



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 /PMK.07/2012

TENTANG

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diatur oleh Gubernur untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disingkat DBH CHT, merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2012.
- (2) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH CHT adalah sebesar Rp1.440.820.160.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- (3) Alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi sementara DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang pembagiannya di masing-masing daerah diatur oleh gubernur di daerah yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Alokasi sementara DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
- (5) Alokasi sementara DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar Rp1.440.819.999.886,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Rincian alokasi sementara DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I pada bulan Maret;
 - b. triwulan II pada bulan Juni;
 - c. triwulan III pada bulan September; dan
 - d. triwulan IV pada bulan Desember.
- (2) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. penyaluran triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi sementara;
 - b. penyaluran triwulan II dan triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi sementara; dan
 - c. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah DBH CHT yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada provinsi, kabupaten, dan kota di daerah provinsi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 4

Penggunaan DBH CHT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

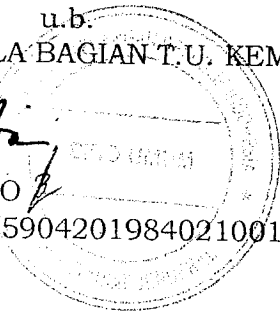
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 330
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 /PMK.07/2012
TENTANG
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2012

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I	Total Provinsi Aceh	5.927.864.782,00
1	Provinsi Aceh	1.778.359.439,00
2	Kab. Aceh Barat	98.797.746,00
3	Kab. Aceh Besar	98.797.746,00
4	Kab. Aceh Selatan	98.797.746,00
5	Kab. Aceh Singkil	98.797.746,00
6	Kab. Aceh Tengah	474.229.183,00
7	Kab. Aceh Tenggara	98.797.746,00
8	Kab. Aceh Timur	98.797.746,00
9	Kab. Aceh Utara	98.797.746,00
10	Kab. Bireuen	98.797.746,00
11	Kab. Aceh Pidie	474.229.183,00
12	Kab. Simeulue	98.797.746,00
13	Kota Banda Aceh	98.797.746,00
14	Kota Sabang	98.797.746,00
15	Kota Langsa	98.797.746,00
16	Kota Lhokseumawe	98.797.746,00
17	Kab. Nagan Raya	98.797.746,00
18	Kab. Aceh Jaya	98.797.746,00
19	Kab. Aceh Barat Daya	98.797.746,00
20	Kab. Gayo Lues	474.229.183,00
21	Kab. Aceh Tamiang	98.797.746,00
22	Kab. Bener Meriah	474.229.183,00
23	Kab. Pidie Jaya	474.229.183,00
24	Kota Subulussalam	98.797.746,00
II	Total Provinsi Sumatera Utara	11.560.493.138,00
1	Provinsi Sumatera Utara	3.468.147.939,00
2	Kab. Asahan	150.101.660,00
3	Kab. Dairi	409.472.978,00
4	Kab. Deli Serdang	245.161.117,00
5	Kab. Karo	978.061.334,00
6	Kab. Labuhan Batu	129.606.349,00
7	Kab. Langkat	175.120.506,00
8	Kab. Mandailing Natal	120.943.677,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
10	Kab. Simalungun	1.068.657.703,00
11	Kab. Tapanuli Selatan	114.156.102,00
12	Kab. Tapanuli Tengah	119.252.405,00
13	Kab. Tapanuli Utara	607.777.857,00
14	Kab. Toba Samosir	110.998.491,00
15	Kota Binjai	119.014.130,00
16	Kota Medan	273.603.430,00
17	Kota Pematang Siantar	1.106.761.936,00
18	Kota Sibolga	103.580.133,00
19	Kota Tanjung Balai	109.217.860,00
20	Kota Tebing Tinggi	110.033.980,00
21	Kota Padang Sidempuan	111.498.224,00
22	Kab. Pakpak Bharat	103.008.385,00
23	Kab. Nias Selatan	119.829.981,00
24	Kab. Humbang Hasundutan	453.465.448,00
25	Kab. Serdang Bedagai	143.981.267,00
26	Kab. Samosir	105.742.416,00
27	Kab. Batu Bara	125.280.850,00
28	Kab. Padang Lawas Utara	109.363.706,00
29	Kab. Padang Lawas	110.704.659,00
30	Kab. Labuhan Batu Selatan	118.835.357,00
31	Kab. Labuhan Batu Utara	119.069.323,00
32	Kab. Nias Utara	105.625.071,00
33	Kab. Nias Barat	101.818.806,00
34	Kota Gunung Sitoli	106.136.625,00
III	Total Provinsi Sumatera Barat	7.057.875.283,00
1	Provinsi Sumatera Barat	2.117.362.585,00
2	Kab. Limapuluh Kota	1.778.777.753,00
3	Kab. Agam	293.967.501,00
4	Kab. Kepulauan Mentawai	111.440.136,00
5	Kab. Padang Pariaman	111.440.136,00
6	Kab. Pasaman	277.023.435,00
7	Kab. Pesisir Selatan	111.440.136,00
8	Kab. Sijunjung	111.440.136,00
9	Kab. Solok	318.963.633,00
10	Kab. Tanah Datar	308.085.007,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
12	Kota Padang Panjang	111.440.136,00
13	Kota Padang	111.440.136,00
14	Kota Payakumbuh	322.468.083,00
15	Kota Sawahlunto	303.945.654,00
16	Kota Solok	111.440.136,00
17	Kota Pariaman	111.440.136,00
18	Kab. Pasaman Barat	111.440.136,00
19	Kab. Dharmasraya	111.440.136,00
20	Kab. Solok Selatan	111.440.136,00
IV	Total Provinsi Jambi	3.929.553.045,00
1	Provinsi Jambi	1.178.865.915,00
2	Kab. Batanghari	117.886.591,00
3	Kab. Bungo	117.886.591,00
4	Kab. Kerinci	1.571.821.220,00
5	Kab. Merangin	117.886.591,00
6	Kab. Muaro Jambi	117.886.591,00
7	Kab. Sarolangun	117.886.591,00
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	117.886.591,00
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	117.886.591,00
10	Kab. Tebo	117.886.591,00
11	Kota Jambi	117.886.591,00
12	Kota Sungai Penuh	117.886.591,00
V	Total Provinsi Sumatera Selatan	3.423.118.351,00
1	Provinsi Sumatera Selatan	1.026.935.506,00
2	Kab. Lahat	342.311.835,00
3	Kab. Musi Banyuasin	68.462.367,00
4	Kab. Musi Rawas	68.462.367,00
5	Kab. Muara Enim	68.462.367,00
6	Kab. Ogan Komering Ilir	68.462.367,00
7	Kab. Ogan Komering Ulu	68.462.367,00
8	Kota Palembang	68.462.367,00
9	Kota Pagar Alam	342.311.835,00
10	Kota Lubuk Linggau	342.311.835,00
11	Kota Prabumulih	68.462.367,00
12	Kab. Banyuasin	68.462.367,00
13	Kab. Ogan Ilir	68.462.367,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
15	Kab. OKU Selatan	342.311.835,00
16	Kab. Empat Lawang	68.462.367,00
VI	Total Provinsi Lampung	4.155.121.023,00
1	Provinsi Lampung	1.246.536.302,00
2	Kab. Lampung Barat	116.129.697,00
3	Kab. Lampung Selatan	164.329.101,00
4	Kab. Lampung Tengah	387.209.792,00
5	Kab. Lampung Utara	239.619.894,00
6	Kab. Lampung Timur	889.979.436,00
7	Kab. Tanggamus	179.287.537,00
8	Kab. Tulang Bawang	89.038.308,00
9	Kab. Way Kanan	89.038.308,00
10	Kota Bandar Lampung	89.038.308,00
11	Kota Metro	116.129.697,00
12	Kab. Pesawaran	179.287.537,00
13	Kab. Pringsewu	191.420.490,00
14	Kab. Mesuji	89.038.308,00
15	Kab. Tulang Bawang Barat	89.038.308,00
VII	Total Provinsi Jawa Barat	137.064.461.313,00
1	Provinsi Jawa Barat	41.119.338.394,00
2	Kab. Bandung	3.377.482.610,00
3	Kab. Bekasi	15.030.203.090,00
4	Kab. Bogor	1.732.709.074,00
5	Kab. Ciamis	2.555.095.842,00
6	Kab. Cianjur	2.620.095.863,00
7	Kab. Cirebon	2.829.224.765,00
8	Kab. Garut	8.712.846.830,00
9	Kab. Indramayu	504.773.536,00
10	Kab. Karawang	10.218.539.450,00
11	Kab. Kuningan	2.764.224.765,00
12	Kab. Majalengka	6.908.511.604,00
13	Kab. Purwakarta	2.418.031.381,00
14	Kab. Subang	2.215.966.920,00
15	Kab. Sukabumi	2.696.581.403,00
16	Kab. Sumedang	7.952.889.613,00
17	Kab. Tasikmalaya	2.418.031.381,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
19	Kota Bekasi	1.869.773.536,00
20	Kota Bogor	1.732.709.074,00
21	Kota Cirebon	2.232.900.759,00
22	Kota Depok	2.280.966.920,00
23	Kota Sukabumi	2.143.902.458,00
24	Kota Cimahi	1.869.773.536,00
25	Kota Tasikmalaya	2.363.181.152,00
26	Kota Banjar	2.208.902.440,00
27	Kab. Bandung Barat	2.006.837.997,00
VIII	Total Provinsi Jawa Tengah	364.242.511.314,00
1	Provinsi Jawa Tengah	109.272.753.399,00
2	Kab. Banjarnegara	3.755.807.612,00
3	Kab. Banyumas	3.388.631.144,00
4	Kab. Batang	4.578.852.988,00
5	Kab. Blora	5.383.647.837,00
6	Kab. Boyolali	8.066.382.246,00
7	Kab. Brebes	3.342.648.227,00
8	Kab. Cilacap	3.372.692.152,00
9	Kab. Demak	8.149.246.146,00
10	Kab. Grobogan	5.029.996.964,00
11	Kab. Jepara	9.005.067.344,00
12	Kab. Karanganyar	10.494.903.235,00
13	Kab. Kebumen	5.090.765.472,00
14	Kab. Kendal	21.303.136.317,00
15	Kab. Klaten	9.823.068.103,00
16	Kab. Kudus	43.120.461.241,00
17	Kab. Magelang	8.415.345.081,00
18	Kab. Pati	10.008.917.608,00
19	Kab. Pekalongan	3.330.875.034,00
20	Kab. Pemasang	3.439.955.234,00
21	Kab. Purbalingga	3.471.679.200,00
22	Kab. Purworejo	3.844.728.619,00
23	Kab. Rembang	3.488.196.112,00
24	Kab. Semarang	5.091.761.438,00
25	Kab. Sragen	3.543.079.808,00
26	Kab. Sukoharjo	4.050.198.524,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
28	Kab. Temanggung	15.769.499.305,00
29	Kab. Wonogiri	3.584.413.308,00
30	Kab. Wonosobo	6.033.257.052,00
31	Kota Magelang	3.351.774.952,00
32	Kota Pekalongan	6.428.189.248,00
33	Kota Salatiga	9.220.563.126,00
34	Kota Semarang	5.516.911.750,00
35	Kota Surakarta	3.614.323.355,00
36	Kota Tegal	3.333.981.556,00
IX	Total Provinsi D.I. Yogyakarta	15.729.730.575,00
1	Provinsi D.I. Yogyakarta	4.718.919.173,00
2	Kab. Bantul	3.145.946.115,00
3	Kab. Gunung Kidul	1.572.973.057,00
4	Kab. Kulon Progo	2.359.459.586,00
5	Kab. Sleman	2.202.162.281,00
6	Kota Yogyakarta	1.730.270.363,00
X	Total Provinsi Jawa Timur	698.035.490.445,00
1	Provinsi Jawa Timur	209.410.647.134,00
2	Kab. Bangkalan	6.061.413.165,00
3	Kab. Banyuwangi	6.599.000.225,00
4	Kab. Blitar	8.055.102.509,00
5	Kab. Bojonegoro	19.045.289.787,00
6	Kab. Bondowoso	11.046.970.129,00
7	Kab. Gresik	6.057.432.015,00
8	Kab. Jember	14.533.200.067,00
9	Kab. Jombang	11.075.839.066,00
10	Kab. Kediri	22.720.057.239,00
11	Kab. Lamongan	10.688.927.128,00
12	Kab. Lumajang	7.457.570.236,00
13	Kab. Madiun	6.558.841.946,00
14	Kab. Magetan	6.279.687.545,00
15	Kab. Malang	30.606.928.188,00
16	Kab. Mojokerto	7.728.594.944,00
17	Kab. Nganjuk	10.062.663.174,00
18	Kab. Ngawi	8.772.501.904,00
19	Kab. Pacitan	6.561.617.388,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
21	Kab. Pasuruan	38.937.544.897,00
22	Kab. Ponorogo	6.501.067.894,00
23	Kab. Probolinggo	19.677.966.130,00
24	Kab. Sampang	8.302.956.321,00
25	Kab. Sidoarjo	13.825.307.316,00
26	Kab. Situbondo	6.952.392.138,00
27	Kab. Sumenep	18.027.736.926,00
28	Kab. Trenggalek	7.298.150.704,00
29	Kab. Tuban	7.586.151.653,00
30	Kab. Tulungagung	14.065.058.220,00
31	Kota Blitar	6.868.172.981,00
32	Kota Kediri	45.473.163.055,00
33	Kota Madiun	6.180.192.838,00
34	Kota Malang	20.582.869.042,00
35	Kota Mojokerto	6.495.651.170,00
36	Kota Pasuruan	5.923.335.524,00
37	Kota Probolinggo	5.696.019.030,00
38	Kota Surabaya	17.882.119.564,00
39	Kota Batu	5.884.683.337,00
XI	Total Provinsi Kalimantan Tengah	3.601.242.127,00
1	Provinsi Kalimantan Tengah	1.080.372.641,00
2	Kab. Barito Selatan	83.105.587,00
3	Kab. Barito Utara	83.105.587,00
4	Kab. Kapuas	83.105.587,00
5	Kab. Kotawaringin Barat	83.105.587,00
6	Kab. Kotawaringin Timur	83.105.587,00
7	Kota Palangkaraya	83.105.587,00
8	Kab. Barito Timur	83.105.587,00
9	Kab. Murung Raya	83.105.587,00
10	Kab. Pulang Pisau	1.440.496.855,00
11	Kab. Gunung Mas	83.105.587,00
12	Kab. Lamandau	83.105.587,00
13	Kab. Sukamara	83.105.587,00
14	Kab. Katingan	83.105.587,00
15	Kab. Seruyan	83.105.587,00
XII	Total Provinsi Sulawesi Tengah	2.779.621.072,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
2	Kab. Banggai	104.235.790,00
3	Kab. Banggai Kepulauan	104.235.790,00
4	Kab. Buol	370.616.143,00
5	Kab. Toli-Toli	370.616.143,00
6	Kab. Donggala	104.235.790,00
7	Kab. Morowali	104.235.790,00
8	Kab. Poso	104.235.790,00
9	Kota Palu	370.616.143,00
10	Kab. Parigi Moutong	104.235.790,00
11	Kab. Tojo Una Una	104.235.790,00
12	Kab. Sigi	104.235.790,00
XIII	Total Provinsi Sulawesi Selatan	9.967.820.610,00
1	Provinsi Sulawesi Selatan	2.990.346.183,00
2	Kab. Bantaeng	132.281.787,00
3	Kab. Barru	134.483.918,00
4	Kab. Bone	747.974.763,00
5	Kab. Bulukumba	195.193.113,00
6	Kab. Enrekang	129.952.482,00
7	Kab. Gowa	124.597.757,00
8	Kab. Jeneponto	124.597.757,00
9	Kab. Luwu	125.668.702,00
10	Kab. Luwu Utara	124.597.757,00
11	Kab. Maros	124.597.757,00
12	Kab. Pangkajene Kepulauan	125.715.753,00
13	Kab. Pinrang	124.597.757,00
14	Kab. Selayar	124.597.757,00
15	Kab. Sidenreng Rappang	124.597.757,00
16	Kab. Sinjai	831.689.195,00
17	Kab. Soppeng	2.661.639.694,00
18	Kab. Takalar	124.597.757,00
19	Kab. Tana Toraja	135.949.774,00
20	Kab. Wajo	136.063.562,00
21	Kota Pare-pare	124.597.757,00
22	Kota Makassar	124.597.757,00
23	Kota Palopo	124.597.757,00
24	Kab. Luwu Timur	124.597.757,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
XIV	Total Provinsi Bali	9.204.256.635,00
1	Provinsi Bali	2.761.276.991,00
2	Kab. Badung	306.808.554,00
3	Kab. Bangli	329.266.940,00
4	Kab. Buleleng	3.615.922.900,00
5	Kab. Gianyar	644.420.690,00
6	Kab. Jembrana	306.808.554,00
7	Kab. Karangasem	319.326.344,00
8	Kab. Klungkung	306.808.554,00
9	Kab. Tabanan	306.808.554,00
10	Kota Denpasar	306.808.554,00
XV	Total Provinsi Nusa Tenggara Barat	159.841.094.981,00
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	47.952.328.509,00
2	Kab. Bima	7.327.541.990,00
3	Kab. Dompu	4.133.396.087,00
4	Kab. Lombok Barat	11.325.504.902,00
5	Kab. Lombok Tengah	22.410.676.311,00
6	Kab. Lombok Timur	41.525.761.701,00
7	Kab. Sumbawa	7.839.112.254,00
8	Kota Mataram	5.200.000.000,00
9	Kota Bima	3.321.321.227,00
10	Kab. Sumbawa Barat	3.705.452.000,00
11	Kab. Lombok Utara	5.100.000.000,00
XVI	Total Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.299.745.192,00
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.289.923.559,00
2	Kab. Alor	73.923.167,00
3	Kab. Belu	234.225.985,00
4	Kab. Ende	918.481.732,00
5	Kab. Flores Timur	61.424.931,00
6	Kab. Kupang	96.103.797,00
7	Kab. Lembata	72.139.137,00
8	Kab. Manggarai	74.313.241,00
9	Kab. Ngada	61.424.931,00
10	Kab. Sikka	147.403.384,00
11	Kab. Sumba Barat	185.969.519,00
12	Kab. Sumba Timur	79.276.725,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(dalam rupiah)

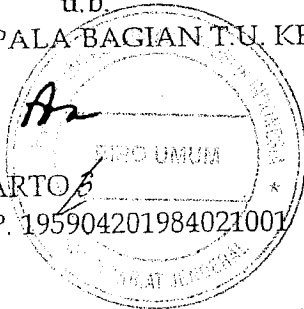
NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
14	Kab. Timor Tengah Utara	61.424.931,00
15	Kota Kupang	61.424.931,00
16	Kab. Rote Ndao	61.424.931,00
17	Kab. Manggarai Barat	112.604.303,00
18	Kab. Nagekeo	108.121.331,00
19	Kab. Sumba Barat Daya	339.645.147,00
20	Kab. Sumba Tengah	61.424.931,00
21	Kab. Manggarai Timur	61.424.931,00
22	Kab. Sabu Raijua	68.062.924,00
Total		1.440.819.999.886,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO